

**ANALISIS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BPKAD KOTA BPKAD**



Skripsi Oleh :

Dicky Satria Panggar Bessy

01031381520075

AKUNTANSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2020**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, sekiranya mereka mengetahui”.

(AQ Al’Ankabut: 64)

“Orang beriman itu hebat,

Dia tak peduli dengan penilaian orang lain dan dia tak terkesan dengan komentar orang lai, karena dia paham, komentar dan penilaian orang lain tak ada nilainya sedikit pun dalam pandangan ALLAH”

(Ust Derry Sulaiman)

“Sesungguhnya yang dapat menerima pelajaran hanyalah orang orang yang sempurna akal pikirannya”

(Q.S, Az-Zumar: 9)

Kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Nabi Muhammah SAW
- Ayahanda & Ibunda
- Kakak & Adik-adikku
- Sahabat-sahabatku
- Dosen-dosenku
- Almamaterku

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BPKAD KOTA
PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama : Dicky Satria Panggar Bessy

NIM : 01031381520075

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi


Bidang Kajian/Konsentrasi : Pengauditan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan


Dosen Pembimbing
Ketua,

Tanggal : 22 November
2019


H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

Anggota,

Tanggal : 22 November
2019


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BPKAD KOTA
PALEMBANG**

Disusun oleh :

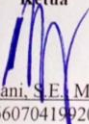
Nama : Dicky Satria Panggar Bessy
NIM : 01031381520075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Pengauditan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 26 Desember 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 13 januari 2020

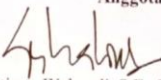
Ketua


H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

Anggota


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Anggota


Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., AK., CPA
NIP. 1963100419900931002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi**


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Satria Panggar Bessy
NIM : 01031381520075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Pengauditan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BPKAD
KOTA PALEMBANG**

Pembimbing :

Ketua : H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 26 Desember 2019

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebut sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 13 Januari 2020

Pembuat pernyataan,



Dicky Satria Panggar Bessy
NIM : 01031381520100

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Pengaruh prior loss, likuiditas, solvabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2015 - 2018)”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
5. Bapak **H. Aspahani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik.

8. Ibu **Rika Henda Safitri, S.E, M.Acc., Ak**, Ibu **Nilam Kesuma, S.E, M.Si., Ak**, dan Ibu **Asfeni Nurullah, S.E, M.Acc., Ak**, yang dengan ikhlas memberikan dan membagikan tidak hanya ilmu pengetahuan secara akademik saja namun juga pembelajaran dalam hidup tentang arti sebuah Perjuangan, Kerja Keras, Pantang Menyerah dan Kejujuran kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang dengan ikhlas telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda, Diharman., S.Sos M.si dan ibunda Suwarni yang telah memberikan bantuan berupa dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus yang tak henti kepada penulis.
12. Kakak dan Adik-adikku tersayang, M.Wanandi Agustian P.B , M. Reza Pahlevi P.B yang telah memberikan semangat berupa keceriaan, canda tawa, perkelahian, dan curhatan kepada penulis
13. Sobat Perjuangan Juliandry Rimba Persada, Fitri Dwi Lestari , M. Aslan Ascary dan Muhammad Rizki Pratama perjuangan dari awal Kuliah hingga sekarang telah memberikan dukungan dan bantuan , membuat hari-hari perkuliahan lebih bermakna
14. Sobat seperjuangan, M. aldi Arwin yang bersama-sama, beriringan menyelesaikan skripsi mulai dari pengajuan proposal, bimbingan, sidang, hingga pengajuan kompre,.
15. Keluarga, BipBip (Bunga Aulia, Riska Tharika, M. Aldi Arwin, M. Aslan Ascary, Fadel Permata, Juliandry Rimba Persada, Januarly Rahmadiana Syafitri, Fadhilla Nina, Yogi Firmansyah Reivandy Tjahja) yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan, membuat hari-hari perkuliahan menjadi lebih bermakna, semua kenangan yang tak terasa telah kita lewati bersama.

16. Sobat Perjuangan Riska Tharika yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi
17. Teman seperjuangan tes tes biji kates (Sherly alfiranty) yang selalu memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung
18. Terkhusus mistis squad (Bunga dan aldi Arwin) Yang selalu ada dikala susah maupun senang
19. Ikhsan sunaryo, Jabar firmansyah, dan Rian lelek yang selalu menemani ketika lagi menyelesaikan Skripsi ini
20. Teman-teman Akuntansi Bukit angkatan 2015 atas kenangan, pengalaman, bantuan dan kebersamaan selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan.
21. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Palembang, 26 Desember 2019



Dicky Satria Panggar Bessy

01031381520075

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dicky Satria Panggar Bessy
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Sei Betung No 57B RT01 RW06
pakjo wayhitam Palembang
Alamat E-mail : Dickysatria19@gmail.com
Pendidikan Formal :
1. Tahun Ajaran 2003-2009 : SD Negeri 17 Palembang
2. Tahun Ajaran 2009-2012 : SMP Negeri 33 Palembang
3. Tahun Ajaran 2012-2015 : SMA Muhammadiyah 01 Palembang
4. Tahun Ajaran 2015-2019 : S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi Universitas Sriwijaya
Pengalaman Organisasi : 1. Anggota Tax Center Universitas
Sriwijaya 2017
Pendidikan Non Formal : Kursus Pendidikan akuntansi (Prospek)



ABSTRAK

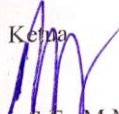
Analisis Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kota Palembang

Oleh:
Dicky Satria Panggar Bessy

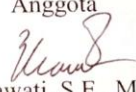
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini merupakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literatur. Pada penelitian ini, peneliti membuat tabel perbandingan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini berupa temuan hasil audit dan meningkatnya signifikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 ke 2018 dengan memberikan saran atau rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja Karyawan


Ketua


H. Aspaham, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

Anggota


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa

:

Nama : Dicky Satria Panggar Bessy
NIM : 01031381520075
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja BPKAD
Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *Grammar*, maupun susunan *Tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 13 januari 2020

Dosen pembimbing :

Ketua



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 19660704192031004

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	9
2.1.2 <i>Audit Pemerintahan</i>	10
2.1.3. Akuntabilitas	19
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis Penelitian.....	26
3.3 Objek penelitian	26
3.4 Sumber Pengumpulan Data.....	27

BAB IV Gambaran Umum Objek

4.1. Sejarah Singkat BPKAD Kota Palembang	31
4.2. Analisis dan Pembahasan.....	40
4.2.1. Analisis Data Hasil Evaluasi tahun 2017	40
4.2.2. Analisis Data Hasil Evaluasi Tahun 2018.....	45
4.2.3 Tabel Perbandingan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 dan 2018	51
4.2.4 Hasil data evaluasi Tahun 2017 dan 2018	53

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Seiring dengan munculnya tuntutan masyarakat untuk instansi pemerintahan memperbaiki kualitas pelayanannya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik dan untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka untuk menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, audit kinerja berperan penting di sektor pemerintahan.

Misalnya banyak nya masalah yang terjadi pada aset dan bangunan di beberapa kota contohnya di data aset pemerintah kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mempunyai aset berupa tanah dan bangunan bermasalah senilai Rp 3,6 triliun karena luasnya tidak diketahui. Data aset yang bermasalah itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 yang dilakukan BPK Perwakilan Jawa Barat. Laporan tersebut selesai dikerjakan pada akhir Mei 2014 (Bpk, 2014)

Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pernah mengungkapkan bahwa penyertifikatan dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan anggaran. Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dalam lima tahun ke depan, tambahan bidang yang bersertifikat mencapai 564 bidang. Tahun ini, alokasi dana tersedia sebesar Rp 1,3 miliar (Bpk, 2014). Itulah di perlukannya audit kinerja pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
5. Pelaksanaan administrasi Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota / bupati melalui Sekretaris Daerah.

Audit kinerja merupakan audit yang dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Audit kinerja meliputi audit terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, apabila audit kinerja dijalankan dengan baik maka akan tercipta akuntabilitas pemerintah sehingga terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Vita Citra Mulyandini, 2010).

Audit kinerja mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memprakarsai tindakan koreksi (Vita Citra Mulyandini, 2010).

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan audit kinerja dan akuntabilitas semakin meningkat agar terciptanya tata pemerintah yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan lembaga atau badan independen untuk dapat melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara, seorang auditor dapat bersikap objektif terhadap semua kegiatan yang diperiksa dan bertindak secara independen. Seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan standar audit yang berlaku dengan maksud agar auditor dalam bekerja mampu meningkatkan kinerjanya (Nurhayati, 2015).

Dalam hal ini BPK Pemerintah Kota Palembang lah yang berperan dalam melakukan pengawasan dengan melakukan audit kinerja terhadap Dinas di Pemerintahan Kota Palembang. BPK daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan walikota.

Berdasarkan penelitian Vita Citra Mulyandini, (2010) dapat disimpulkan bahwa audit kinerja yang memadai akan menunjang pelaksanaan akuntabilitas publik, sebab dengan dilakukannya audit kinerja pada dinas dilingkungan pemerintah dapat memberi jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang diberikannya telah dikelola secara ekonomi, efektif, dan efisien.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Anjarwati, 2012).

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga- lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah

dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada di lingkungan daerah tersebut (Afrina, 2015).

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi Pemerintah (SAKIP)nya serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) insyansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik.

Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena pemerintah adalah subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya (Tarigan, 2013)

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memunculkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada

daerah Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan UU tersebut juga telah melahirkan suasana baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris .(Putra, 2013)

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingann masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan melakukan upaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baikk pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka (Putra, 2013)

Pelaksanaan *good governance* menuntut pemerintah melakukan perbaikan sistem birokrasinya agar terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan accountable sehingga pemerintahan menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas dapat terbentuk. Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah tidak cukup representatif untuk menunjukkan ketransparanan dan keakuntabilitan instansi karena hanya mengukur kemampuan pemerintah dalam menyerap sumber daya input terutama anggaran sebanyak-banyaknya sehingga paradigma sistem pengukuran kinerja ini perlu untuk diubah. Perubahan sistem pengukuran kinerja tersebut ditandai dengan adanya kewajiban setiap instansi pemerintah untuk membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan setiap instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis

Berdasarkan latar belakang, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam suatu pemerintahan, dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut terkait terhadap kinerja pemerintah terhadap akuntabilitas dinas pemerintah.

Penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut. **ANALISIS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BPKAD KOTA PALEMBANG**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan diatas maka dapat dirumuskan masalah

1. Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota Palembang 2017
2. Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota Palembang 2018

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota Palembang
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan.
3. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
4. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
6. Menilai tingkat implementasi SAKIP

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis berkenaan dengan pengaruh audit kinerja bpkad terhadap akuntabilitas bpkad kota Palembang

2. Bagi Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang optimal

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9010>
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 13(2), 15–27.
- Bpk. (2014). bpk. *Bpk*, pp. 1–2.
- Eka Jas Oktavia Sari. (2016). PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DESENTRALISASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOM Fekon*, 3(1), 381–393.
- Handayani, A. P. L. ? B. D. (2014). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN BATANG. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 177–186.
- Ibrahim. (2016). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah*, 13(2), 408–418.
- Imam ghozali. (2005). “ *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*” (cet IV). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ningsih, N. H. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD BERKONSEP VALUE FOR MONEY DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DI SKPD KOTA PALEMBANG. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 2(No 1), 171–191.

- Nurhayati. (2015). PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh) Oleh. *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES PENGARUH*, 6(2), 22–41.
- Nurhayati Soleha. (2014). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN: STUDI PADA SKPD KABUPATEN/KOTA PROPINSI BANTEN. *Jurnal Etikonomi*, 3(1), 21–34.
- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–23.
- Rahmat, I. S. B. (2012). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG*. 5, 13–15.
- Sadjiarto, A. (2000). AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud Urip. *Jurnal Administrasi Bisnis (2008)*, 4(1), 73.
- Tarigan, E. P. A. L. N. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kebijakan Dan Adminstrasi Publik*, 17(1), 29–45.
- Vita Citra Mulyandini. (2010). Pengaruh Audit Kinerja Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Dinas Pemerintah Kota Cimahi. *Portofolio*, 13(1), 1–20.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vo.1 No.1,(1), 21–37.